

Kebijakan Pimpinan Pesantren Dalam Pengembangan Budaya Belajar Santri di Pesantren Muhammadiyah Sipirok Tapanuli Selatan

Abdul Salam Pulungan, Saiful Akhyar Lubis, Amiruddin Siahaan
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
e-mail: *abdulsalampulungan@gmail.com*

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplor terhadap perumusan dan implementasi kebijakan budaya belajar santri oleh pimpinan pesantren Muhammadiyah Sipirok Tapanuli Selatan. Metode penelitian yang dipilih adalah kualitatif deskriptif dengan pengambilan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Data disajikan dengan mengambil model Miles dan Huberman pengumpulan data (*data collection*), reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing & verifying*). Kemudian, untuk memastikan keabsahan data peneliti melalui teknik perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan dan triangulasi. Hasil penelitian diperoleh, pertama bahwa perumusan kebijakan pimpinan pesantren dalam melakukan pengembangan budaya belajar santri adalah melakukan musyawarah secara kolektif, antara pimpinan tingkatan level pendidikan (MTS dan MA), guru, dan perwakilan santri. Pengembangan budaya belajar pun tidak terbatas pada ruangan kelas, tetapi untuk di luar kelas dan bahkan di luar lingkungan pesantren. Kedua, pelaksanaan kebijakan kepemimpinan dalam melakukan pengembangan budaya belajar santri, dimulai dari sosialisasi, penguatan karakter prestasi seperti ikhlas dan sabar. Dapat ditemukan, pengembangan budaya belajar santri terlihat di ruang kelas, masjid, ekstrakurikuler.

Kata kunci: Kebijakan, Pimpinan, Pesantren, Budaya Belajar

A. PENDAHULUAN

Eksistensi lembaga pendidikan Islam bagian dalam skala nasional diakui memiliki kontribusi yang cukup signifikan dengan lembaga pendidikan lainnya. Sekaligus secara bersamaan untuk mencapai tujuan pendidikan Nasional.(Sisdiknas, 2003) Kesiapan pesantren secara historis telah memainkan peran dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia.(Samsul Nizar, 2010). memastikan bahwa signifikansi lembaga pendidikan Islam di Indonesia, pada tahun 2010 diperdapat 45.000 lembaga.(Mesiono, 2019).

Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan yang memiliki potensi yang cukup besar untuk pemberdayaan masyarakat sekitarnya, termasuk upaya transformasi sosial yang akan dilakukan oleh lembaga ini.(Sulaiman, 2018) Keberadaan pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia. Pesantren difungsikan sebagai suatu lembaga yang dipergunakan untuk penyebaran agama dan tepat mempelajari agama Islam. Pesantren juga mengusahakan pembinaan tenaga-tenaga bagi pengembangan agama. Kemampuan pondok pesantren bukan hanya dalam pembinaan pribadi muslim, melainkan dalam usaha mengadakan perubahan sosial dan kemasyarakatan. Pengaruh pondok pesantren tidak saja terlihat pada kehidupan santri dan alumninya, melainkan juga meliputi kehidupan masyarakat sekitarnya. Pesantren menjadi bagian integral sistem pendidikan nasional berarti merupakan pendidikan keagamaan Islam yang juga diatur dalam sistem pendidikan nasional.(Syafaruddin, 2014) tinjauan secara konsep ada tiga hal yang dibahas dalam prosesi pendidikan.

Pertama, pendidikan harus diorientasikan kepada pencapaian tujuan pendidikan nasional secara efektif dan efisien, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Kedua, menumbuhkan budaya belajar (culture learning) kepada seluruh lapisan masyarakat. Sebab melalui budaya belajar inilah antara lain yang menyebabkan Negara-negara seperti Jerman, Prancis, Jepang, dan Singapura mencapai standard

yang tinggi dalam pendidikan dan mutu sumber daya manusia.(Syafaruddin, 2012).

Konsepsi yang dibangun di atas menghantarkan sebuah budaya yang diperdapat di dalam sebuah pesantren, dalam hal ini pesantren Muhammadiyah Sipirok Tapanuli Selatan. Yang notabene nya terjadi sebuah penurunan kualitas dibandingkan dengan sebelumnya. Tentu banyak persoalan yang harus diketengahkan. Seperti sarana prasarana, guru, santri, juga persoalan kepemimpinan pesantren.

Wacana yang disebutkan terakhir, yakni kepemimpinan sarat muatan kebijakan yang dilahirkan dalam membentuk, mewujudkan dan mengelola pendidikan yang lebih unggul untuk budaya belajar santri di lembaga tersebut. oleh karenanya, bagi peneliti pentingnya dimuat sebuah kajian yang serius untuk diketengahkan. Untuk lebih fokus, peneliti menghadirkan pertanyaan. Bagaimana perumusan kebijakan pimpinan pesantren dalam pengembangan budaya belajar santri di Pesantren Muhammadiyah Sipirok Tapanuli Selatan ? Bagaimana pelaksanaan kebijakan pimpinan pesantren dalam pengembangan budaya belajar di Pesantren Muhammadiyah Sipirok Tapanuli Selatan?

B. KAJIAN PUSTAKA

A. Kebijakan Pendidikan

Istilah “kebijakan pendidikan” merupakan terjemahan dari “*educational policy*” yang berasal dari kata *education* dan *policy*. Kebijakan adalah seperangkat aturan. Sedangkan pendidikan menunjukkan kepada bidangnya. Jadi kebijakan pendidikan hampir sama artinya dengan kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan. Kebijakan pendidikan merupakan kebijakan publik yang mengatur khusus berkaitan dengan penyerapan sumber, alokasi, dan distribusi sumber serta pengaturan perilaku dalam ranah pendidikan. Kebijakan yang dimaksud disini adalah seperangkat aturan sebagai bentuk keberpihakan dari pemerintah dalam upaya membangun satu sistem pendidikan, sesuai dengan tujuan dan cita-cita yang diinginkan bersama.(Madjid, 2018) Kebijakan pendidikan mengkaji hubungan antara kebijakan pendidikan dan praktik pendidikan, sebagaimana jurnal berikut ini. *Educational Policy (EPX) focuses on the practical*

consequences of educational policy decisions and alternatives. It examines the relationship between educational policy and educational practice, and sheds new light on important debates and controversies within the field.

Kebijakan pendidikan merupakan rumusan dari berbagai cara untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pencapaian kedua pesan konstitusi untuk pendidikan nasional dijabarkan didalam berbagai kebijakan pendidikan. Kebijakan-kebijakan pendidikan tersebut direncanakan dapat diwujudkan atau dicapai melalui lembaga-lembaga sosial (*social institutions*) atau organisasi sosial dalam bentuk lembaga-lembaga pendidikan formal,(Wardi & Arif, 2023) non formal, informal.(Galih R, 2016) Selanjutnya, Tilaar dan Riant Nugroho menjelaskan bahawa kebijakan pendidikan adalah keseluruhan proses dan hasil perumusan langkah-langkah strategis pendidikan yang dijabarkan dari visi serta misi pendidikan dalam mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan dimasyarakat dalam kurun waktu tertentu. Bentuk dari kebijakan pendidikan ialah undang-undang pendidikan, instruksi presiden, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, peraturan menteri dan lain sebagainya yang menyangkut pendidikan.(Galih R, 2016) Kebijakan pendidikan, menurut Ali Imron memiliki karakteristik yakni memiliki tujuan pendidikan, memiliki aspek legal-formal dan memiliki konsep operasional.(Rusdiana, 2015) Menurut Arif Rohman ada tiga faktor yang dapat menentukan kegagalan dan keberhasilan dalam implementasi kebijakan yaitu faktor yang terletak pada rumusan kebijakan yang telah dibuat oleh para pengambil keputusan, faktor yang terletak pada personil pelaksana, dan faktor yang terletak pada sistem organisasi pelaksana.(Rohman, 2009a)

B. Kepemimpinan Pesantren

Setiap organisasi dan semua organisasi apapun jenisnya pasti memiliki dan memerlukan seorang pemimpin dan pimpinan tertinggi (pimpinan puncak) atau manajer tertinggi (*top manager*) yang harus menjalankan kegiatan kepemimpinan (*leadership action*) atau manajemen (*management*) bagi keseluruhan organisasi sebagai satu kesatuan. Dalam kenyataan banyak organisas yang tidak cukup hanya dikendalikan oleh seorang manajer/pemimpin, karena itulah maka digunakan istilah pemimpin dan pimpinan (lebih dari satu orang yang memimpin). Organisasi yang dipimpin oleh lebih dari satu orang adalah terutama organisasi

yang berskala besar dan menengah, bahkan yang berskala kecil, memerlukan juga pemimpin-pemimpin untuk membantu pimpinan puncak dengan menjadi pimpinan-pimpinan pada unit kerja yang jenjangnya lebih rendah.(Wijaya, 2017)

Kepemimpinan merupakan salah satu faktor yang sangat berperan dalam organisasi, baik buruknya organisasi sering kali sebagian besar tergantung pada faktor pemimpin.(Muhaimin, 2010) Berdasarkan pembahasan makna dari kata pemimpin dan term kepemimpinan di atas, maka pengertian kepemimpinan dalam pendidikan Islam merupakan memiliki relasi dengan orang lain. Jika tidak ada relasi atau pengikut, maka hal itu tidak disebut pemimpin. Tersirat dalam pengertian tersebut bahwa para pemimpin efektif harus mengetahui bagaimana membangkitkan inspirasi dan berelasi dengan pengikut mereka. Pemimpin merupakan suatu proses. Agar bisa memimpin, pemimpin mesti melakukan sesuatu. Kepemimpinan lebih dari sekedar menduduki posisi otoritas. Kendati posisi otoritas yang di formalkan mungkin sangat mendorong proses kepemimpinan, tapi sekedar menduduki posisi itu tidak memadai untuk membuat seseorang menjadi pemimpin. Pemimpin harus membujuk orang-orang untuk mengambil tindakan. Pemimpin membujuk pengikut dengan berbagai cara, seperti menggunakan otoritas yang terlegitimasi, menciptakan model (teladan), penerapan sasaran, memberi imbalan dan hukuman, restrukturisasi organisasi dan mengkomunikasikan sebuah visi.(Purba, 2017)

Maka dengan kata lain, kepemimpinan adalah upaya untuk mentransformasikan semua potensi yang terpendam menjadi kenyataan. Tugas dan tanggung jawab seorang pemimpin adalah menggerakkan dan mengarahkan, menuntun memberi motivasi serta mendorong orang yang dipimpin untuk berbuat sesuatu guna mencapai tujuan. Sedangkan tugas dan tanggung jawab yang dipimpin adalah mengambil peran aktif dalam mensukseskan pekerjaan yang dibebankannya tanpa adanya kesatuan komando yang didasarkan atas satu perencanaan dan kebijakan yang jelas, maka rasanya sulit diharapkan tujuan yang telah diterapkan akan tercapai dengan baik. Bahkan sebaliknya, yang terjadi adalah kekacauan dalam pekerjaan. Inilah arti penting komitmen dan kesadaran bersama untuk mentaati pemimpin dan peraturan yang telah ditetapkan.(Purba, 2017) Dalam bahasa Arab, Kepemimpinan sering diterjemahkan sebagai *al-*

riayah, Al-imarah, al-qiyadah, atau al-zaamah. Sementara itu, menyebut kepemimpinan pendidikan, para ahli lebih memilih istilah *qiyadah tarbawiyah.*(Qomar, 2007)

C. Budaya Pesantren

Karakteristik utama budaya pesantren di antaranya:

1. Modeling

Modeling di sini dalam ajaran Islam bisa diidentikkan dengan *uswatun hasanah* yakni contoh yang ideal yang selayaknya atau seharusnya diikuti dalam komunitas ini. Tidak menyimpang dari ajaran dasar Islam, modeling dalam dunia pesantren agaknya lebih diartikan sebagai tasyabbuh.

2. Cultural resistance

Mempertahankan budaya dan tetap bersandar pada ajaran dasar Islam adalah budaya pesantren yang sudah berkembang berabad-abad. Sikap ini tidak lain merupakan konsekuensi logis dari modeling. Disayangkan bahwa hampir belum ada ilmuan yang memusatkan perhatian pada dua aspek ini secara proporsional. Konsepsi ini bahkan sering disalahpahami oleh sarjana-sarjana barat seperti penghampiran mereka yang lebih memusatkan perhatian pada sinkretisme Islam atau juga studi yang lebih menekankan wajah Hindu-Budha sebagai induk budaya Jawa sementara Islam dipandang sebagai anak budaya.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dengan menggunakan pendekatan metode kualitatif. Oleh Bogdan dan Steven J. Taylor menjelaskan bahwa penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa ucapan, tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.(M. Junaidi Ghony, 2012) Denzin dan Lincoln, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.(Djam'an Satori, 2013) Oleh karena itu, pendekatan kualitatif digunakan untuk menguraikan kebijakan pimpinan pesantren dalam pengembangan budaya belajar santri di pesantren Muhammadiyah Sipirok

Tapanuli Selatan, mengungkapkan data secara mendalam melalui wawancara,(Sanjaya, 2013) observasi serta kajian dokumen.

Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Adapun Model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman berlangsung secara simultan yang dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data dengan alur tahapan, yaitu: pengumpulan data (*data collection*), reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing & verifying*) kemudian untuk penjaminan keabsahaan data yaitu dengan melakukan teknik perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan dan triangulasi.(Moleong, 2004)

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan pimpinan Pesantren

Perumusan kebijakan pimpinan pesantren dalam pengembangan budaya belajar, hasil temuan peneliti menunjukkan bahwa pimpinan pesantren dalam pengembangan budaya belajar santri di pesantren Muhammadiyah sipirok Tapanuli Selatan dilakukan dengan cara musyawarah yang dihadiri oleh Direktur, kepala bagian, Kepala Madrasah Aliayah, Kepala Tsanawiyah, Pimpinan Kesyarikatan, Guru-guru, perwakilan santri-santriyah melalui IPM, orangtua, serta stake holder lainnya. Proses pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah yang dilakukan oleh pimpinan pesantren Muhammadiyah Sipirok Tapanuli, yang merujuk pada Surat Ali-Imran Ayat 159, dengan penegasan terhadap berlemah lembut.

Kebijakan merupakan seperangkat tujuan-tujuan, prinsip-prinsip serta peraturan-peraturan yang membimbing sesuatu organisasi, kebijakan dengan demikian mencakup keseluruhan petunjuk organisasi. Kebijakan adalah hasil keputusan manajemen puncak yang dibuat dengan hati-hati yang intinya berupa tujuan-tujuan, prinsip dan aturan-aturan yang mengarahkan organisasi.(Syafaruddin, 2008) Proses kebijakan dilakukan untuk menciptakan daya kritis dalam menilai, serta mampu mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan dalam satu atau beberapa tahap dalam proses

perumusan kebijakan. Tahap-tahap tersebut mencerminkan aktivitas yang terus berlangsung yang terjadi sepanjang waktu. Setiap tahap berhubungan dengan tahap berikutnya, dan tahap terakhir (penilaian kebijakan) dikaitkan dengan tahap pertama (penyusunan agenda), atau tahap ditengah, dalam lingkaran aktivitas yang tidak linier.(Kadji, 2015)

Perumusan kebijakan atau penyusunan alternatif kebijakan pendidikan juga dipandang proses perencanaan analisis kebijakan pendidikan. Perumusan kebijakan menjadi tahap kritis dari proses kebijakan. Karena terkait dengan proses pemilihan alternatif kebijakan oleh pembuat kebijakan yang biasanya mempertimbangkan pengaruh langsung yang dihasilkan dari pilihan alternatif utama. Proses ini biasanya mengekspresikan dan mengalokasikan kekuatan, dukungan yang saling tarikmenarik di antara berbagai kepentingan sosial, politik, dan ekonomi. Tahapan perumusan kebijakan tentu melibatkan aktivitas identifikasi dan atau merangkai seperangkat pilihan (alternatif) kebijakan untuk mengatasi permasalahan serta mempersempit seperangkat solusi sebagai persiapan dalam penentuan rumusan kebijakan akhir yang akan ditetapkan.

Perumusan kebijakan pendidikan menjadi bagian terpenting secara teknis dalam perumusan analisis kebijakan yang dilakukan secara terus-menerus. Oleh karena itu tidak mengherankan jika proses perumusan kebijakan pendidikan sering disebut sebagai lingkaran kebijakan pendidikan yang berputar terus-menerus. Perumusan kebijakan pendidikan harus bersifat bijaksana, dalam artian tidak menimbulkan kegaduhan. problematika pendidikan baru, yang lebih rumit, lebih luas wilayahnya dan lebih kompleks dibandingkan problem pendidikan yang hendak diselesaikan atau dipecahkan. Perumusan kebijakan pendidikan sebagai proses Perumusan kebijakan pendidikan sebagai proses pengembangan rencana usulan tindakan yang terkait dan dapat diterima sebagai alternatif, proposal, atau pilihan) untuk menangani permasalahan pendidikan. Perumusan kebijakan pendidikan tidak selamanya juga akan berakhir dengan dikeluarkannya sebuah produk peraturan perundangundangan. Namun, umumnya rencana kebijakan biasa ditujukan untuk membawa perubahan mendasar terhadap kebijakan yang sudah ada saat ini.(Arwildayanto, 2018a)

Menurut Arif Rohman ada tiga faktor yang dapat menentukan kegagalan dan keberhasilan dalam implementasi kebijakan yaitu: (1) Faktor yang terletak pada rumusan kebijakan yang telah dibuat oleh para pengambil keputusan. Hal ini menyangkut kalimatnya jelas atau tidak, mudah dipahami atau tidak, mudah diinterpretasikan atau tidak, dan terlalu sulit dilaksanakan atau tidak. (2) Faktor yang terletak pada personil pelaksana. Faktor ini menyangkut tingkat pendidikan, pengalaman, motivasi, komitmen, kesetiaan, kinerja, kepercayaan diri, kebiasaan-kebiasaan, serta kemampuan kerja sama dari para pelaku pelaksana kebijakan. Faktor yang terletak pada sistem organisasi pelaksana. Hal ini menyangkut jaringan sistem, hirarki kewenangan masing-masing peran, model distribusi pekerjaan, gaya kepemimpinan dari pemimpin organisasinya, aturan main organisasi, target masing-masing tahap yang ditetapkan, model monitoring yang biasa dipakai, serta evaluasi yang dipilih. (Rohman, 2009b)

Berdasarkan temuan hasil kajian tentang gaya kepemimpinan dalam pengambilan kebijakan di perguruan Islam pondok Tremas Pacitan, strategi pengambilan kebijakan di Perguruan Islam Pondok Tremas berlangsung dalam sistem musyawarah atau syura. Mekanisme pengambilan kebijakan dalam musyawarah tersebut terdiri dari tiga tahap. Tahap pertama, *intelligent* yaitu mengintai dan mengidentifikasi situasi dan kondisi lingkungan di dalam maupun di luar Pondok Tremas. Tahap kedua, *design* yaitu menemukan, mengembangkan, dan menganalisis kemungkinan-kemungkinan dari aksi yang akan diambil oleh musyawir. Dan tahap ketiga, *choice* yaitu memilih satu yang terbaik dari sejumlah alternatif. (Wijayanti, 2019) Sejalan dengan hal ini bahwa pimpinan pesantren dalam pengembangan budaya belajar santri di pesantren Muhammadiyah sipirok Tapanuli Selatan dilakukan dengan cara musyawarah.

Berdasarkan paparan di atas, dengan jelas menerangkan Pimpinan pesantren menjalankan fungsinya dalam perumusan kebijakan dalam pengembangan budaya belajar di pesantren muhammadiyah sipirok tapanuli selatan. Fungsi yang dilakukan pimpinan berhubungan dengan pencarian solusi evaluasi yang dihadapi, selanjutnya pimpinan memberikan gagasan serta saran-saran.

Mencermati perumusan kebijakan pimpinan pesantren, peneliti melihat pimpinan terus berusaha mengarahkan seluruhnya agar sesuai dengan ajaran Islam dalam upaya pengembangan budaya belajar. Hal demikian dapat dilihat adanya kegiatan-kegiatan yang mendukung budaya belajar di pesantren muhammadiyah sipirok tapanuli selatan. Dalam pengambilan kebijakan pimpinan dengan cara bermusyawarah.

B. Pelaksanaan Kebijakan Pimpinan Pesantren

Pelaksanaan kebijakan pimpinan pesantren dalam pengembangan budaya belajar di Pesantren Muhammadiyah Sipirok Tapanuli Selatan, temuan peneliti menunjukkan bahwa, Pelaksanaan kebijakan pimpinan pesantren bahwa pimpinan melakukan sosialisasi, pelaksanaan dengan prinsip keikhlasan, dan kesabaran, dengan memegang prinsip Islam, memegang prinsip-prinsip pendidikan yang berlaku di Indonesia serta evaluasi pelaksanaan secara rutin.

Kebijakan (*policy*) umumnya digunakan untuk memilih dan menunjukkan pilihan terpenting untuk mempererat kehidupan, baik dalam kehidupan organisasi pemerintahan maupun privat. Kebijakan harus bebas dari konotasi atau nuansa yang dicakup dalam kata politis (*political*), yang sering diyakini mengandung makna keberpihakan akibat adanya kepentingan. Kebijakan sebuah ketetapan berlaku dan dicirikan oleh perilaku yang konsisten serta berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang menaatinya (yang terkena kebijakan).(Anggara, 2014)

Implementasi kebijakan terdiri dari berbagai aspek antara lain; 1) *Idealized policy*; pola interaksi digagas oleh para perumus kebijakan, tujuannya untuk mendorong, mempengaruhi dan merangsang target grup untuk melaksanakannya, 2) *target groups*; bagian dari kebijakan pihak terkait (*policy stakeholder*) diharapkan dapat mengadopsi pola interaksi oleh perumus kebijakan. Karena kelompok ini menjadi sasaran dari implementasi kebijakan, diharapkan dapat menyesuaikan pola perilaku dengan kebijakan yang telah dirumuskan, 3) *implementing organization*; badan pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan dan *environmental factors*; unsur-unsur yang berada didalam lingkungan sekitarnya turut serta mempengaruhi implementasi kebijakan seperti aspek tradisi budaya, realitas sosial, stabilitas ekonomi dan politik.(Arwildayanto, 2018b) Proses implementasi menjadi jembatan

penghubung perumusan kebijakan dengan hasil (*outcome*) kebijakan yang diharapkan. (Arwildayanto, 2018b)

Tahapan implementasi kebijakan pendidikan implementasi, kebijakan merupakan suatu proses yang sangat kompleks dan rumit. Sehingga Eugene Bardch memandang Implementasi cukup untuk membuat sebuah program dan kebijakan umum yang kelihatannya bagus di atas kertas. Realitasnya sulit merumuskan dalam kata dan slogan yang kedengarannya mengenakan bagi telinga para pemimpin dan bawahannya yang mendengarkan dan lebih sulit untuk melaksanakan dalam berbagai bentuk dan cara yang memuaskan semua pihak, termasuk pelanggan. Pernyataan ini menyiratkan implementasi kebijakan pendidikan menjadi salah satu aktivitas atau kegiatan dalam proses kebijakan yang menentukan apakah sebuah kebijakan bersentuhan dengan kepentingan stakeholder pendidikan serta dapat diterima oleh masyarakat (*public*). Dalam hal ini, dapat diketahui bila dalam tahapan dan formulasi kebijakan dilakukan dengan baik, tetapi jika pada tahapan implementasinya tidak diperhatikan optimalisasinya, maka tentu tidak jelas apa yang diharapkan dari sebuah produk kebijakan itu. Pada akhir tahapan evaluasi kebijakan, menghasilkan penilaian antara lain bahwa formulasi dan implementasi kebijakan tidak seiring sejalan. Jika demikian, bisa dikatakan implementasi kebijakan pendidikan itu tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Implementasi merupakan tahapan pelaksanaan kebijakan pendidikan merupakan suatu hubungan yang kompleks dengan memperhatikan dua hal yaitu: a) formulasi tujuan kebijakan pendidikan harus jelas termasuk kelompok sasaran, siapa yang berperan, dan bagaimana kebijakan pendidikan harus dilaksanakan, dan b) dana pendukung yang proporsional, karena tanpa dana kebijakan tidak akan pernah sepenuhnya terealisasi. Implementasi kebijakan pendidikan mengadaptasi pemikiran Charles O Jones dalam Gaffar memiliki tiga tahapan utama, yakni *organization, interpretation, and application*. Konteks pengorganisasian implementasi kebijakan pendidikan, bisa dilihat dari makna *organization is the establishment or rearrangement of resources, units and methods for putting a policy into effect*. Maksudnya, aktivitas implementasi kebijakan pendidikan diawali dengan pengorganisasian (*organization*) sebagai

upaya menetapkan dan menata sumber daya (*resources*), unit (*units*), dan metode (*methods*) mengarah pada upaya mewujudkan atau merealisasikan kebijakan pendidikan menjadi hasil (*outcome*) sesuai dengan tujuan dan sasaran kebijakan pendidikan. Ada beberapa pengorganisasi dilakukan, yaitu, a) penataan sumber daya manusia yang kompeten, misalnya implementasi kebijakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) memerlukan SDM yang handal, b) Standar Operasional Procedure (SOP), misalnya kebijakan BOS memerlukan panduan berupa SOP baku menunjang keberhasilan implementasinya, c) kesatuan antar pelaksana, d) penetapan sarana dan prasarana. Keberhasilan implementasi kebijakan BOS harus didukung sarana dan prasarana yang memadai, misalnya untuk sekretariat pengelola. Sedangkan dalam konteks interpretasi, bisa dimaknai dari konsepsi *interpretation is the translation of language (often contained in a statute) into acceptable and feasible plans and directives*. Tahapan interpretasi (*interpretation*) disini merupakan penjelasan substansi dari kebijakan pendidikan dalam bahasa lebih operasional, mudah dipahami, dapat dilaksanakan dan diterima oleh para pelaku dan sasaran kebijakan pendidikan itu sendiri. Tahap Interpretasi disini menjabarkan dan menerjemahkan kebijakan pendidikan yang masih berbentuk abstrak menjadi rumusan, sifatnya teknis dan operasional. Hasil interpretasi seringkali keluarannya berbentuk petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis. Pada aspek interpretasi (*interpretation*) meliputi antara lain: isi dan tujuan kebijakan, petunjuk pelaksanaan, sumber daya, dukungan dan sikap masyarakat.

Terkait dengan penerapan, dimaknai bahwa *application is the routine of service, payments, or other agree upon objectives or instrument*. Tahapan application ini merupakan tahapan aktivitas pelaksanaan atau penyediaan layanan secara rutin sesuai tujuan dan sasaran kebijakan yang ada Tahapan aplikasi ini sering juga disebut sebagai tahapan penerapan rencana implementasi kebijakan pendidikan ke kelompok target atau sasaran kebijakan pendidikan. (Arwildayanto, 2018b) Dalam pelaksanaan kebijakan perlu adanya sosialisasi kebijakan, Sosialisasi kebijakan dilakukan, untuk proses pengenalan nilai-nilai yang terkandung dalam kebijakan itu, prosedur, maupun kesamaan pemahaman yang sedemikian rupa penting dilakukan hingga akhirnya terbentuk suatu kesatuan penafsiran antar individu di dalam organisasi tersebut. Maka dapat

dikatakan seorang individu tidak pernah mengikuti sosialisasi dengan sempurna, maka ia dapat diumpamakan sebagai manusia belum utuh menjalankan kebijakan. Jadi dalam konteks kebijakan, menurut Harton dan Hunt sosialisasi pada prinsipnya adalah sistem agar suatu keputusan dapat mencapai tujuannya. Suatu program kebijakan disosialisasikan agar mempunyai tujuan atau efek yang diinginkan. sosialisasi di pandang sebagai proses interaksi antara satu perangkat pelaksana, tindakan dan tujuan yang dapat mencapai sasaran kebijakan, dimana di dalam sosialisasi kebijakan aktor, organisasi, prosedur, dan teknik di pakai secara bersama. Biasanya berbagai permasalahan seputar sosialisasi kebijakan, belum diketahuinya aturan, prosedur, tanggungjawab, batasan, koordinasi, tindakan yang tepat belum diketahui masyarakat. Untuk mengatasi agar tidak terjadi miskomunikasi, kesalahan intepretasi, pada hakekatnya sosialisasi kebijakan ini harus dilakukan dalam konteks organisasi yang menyeluruh dengan tujuan dan target yang jelas, prioritas yang jelas sumber daya pendukung yang jelas pula. Hal ini dipertegas Vembriarto bahwa sosialisasi kebijakan adalah proses akomodasi dimana individu menahan, mengubah implus implus dalam dirinya, dan mengambil cara hidup atau kebudayaan masyarakatnya atau organisasi tempat yang bersangkutan bernaung.. Hal senada juga dijelaskan George Herbert Mead menyatakan bahwa sosialisasi kebijakan merupakan proses dimana manusia belajar melalui cara, nilai dan menyesuaikan tindakan dengan masyarakat dan budaya lainnya, melihat bagaimana manusia meningkatkan pertumbuhan pribadi mereka agar sesuai dengan keadaan, nilai, norma dan budaya sebuah masyarakat tersebut yang berlaku di sekelilingnya melalui merasa, dan percaya diri sendiri dan proses sosialisasi dibudayakan sepanjang hayat.

Sosialisasi kebijakan pendidikan menjadi sebuah mekanisme penyampaian informasi kebijakan pendidikan kepada publik. Sosialisasi ini dapat dilakukan dengan berbagai media, baik cetak maupun elektronik. Sedangkan kebijakan merupakan aturan tertulis yang merupakan keputusan formal. Tujuan sosialisasi kebijakan pendidikan pada umum adalah mengupayakan masyarakat luas memahami dan mampu menginternalisasikan makna dari tujuan dan konsep dari keputusan pemerintah, masyarakat umum mengetahui dan memahami perkembangan implementasi kebijakan dan progam pemerintah sebagai bagian

dari pertanggungjawaban terhadap masyarakat, menjadi bagian dari kegiatan kegiatan pelibatan masyarakat yang terdapat dalam siklus program dari kebijaksanaan pemerintah. Sedangkan secara khusus adalah agar terdapatnya kerjasama dan komitmen antara pemerintah dengan masyarakat, atau antara masyarakat dengan masyarakat untuk membuat rencana, menjalankan rencana dan memonitor mensupervisi secara bersama, dapat membangkitkan motivasi kelompok strategis dan kelompok peduli untuk melakukan tindakan baik dalam kerjasama maupun membangun pengawasan terhadap tujuan kebijakan pendidikan, dan menyebarkan hasil hasil perkembangan program kebijakan di bidang pembanguan pendidikan kepada masyarakat luas. Biasanya kebijakan yang sudah dirumuskan, ditetapkan sekaligus disyahkan melalui perundang undangan atau peraturan dan keputusan pimpinan lainnya, tentu memerlukan dukungan sosialisasi. Karena sosialisasi adalah kunci dalam menilai efektivitas penerapan suatu peraturan perundang undangan yang menjadi produk kebijakan. Sosialisasi seharusnya telah dilakukan sejak suatu produk kebijakan dirancang sehingga sejak dini, materi muatan aturan dan ketentuan yang mengikat di dalamnya sudah mendapat masukan dari masyarakat. Sosialisasi juga mesti dilaksanakan setelah produk kebijakan disahkan dan diundangkan agar ketentuannya diketahui dan dilaksanakan, disinilah urgensi proses sosialisasi kebijakan dilakukan, termasuk produk kebijakan dibidang pendidikan.

Seringkali kelemahan dalam sosialisasi produk kebijakan pendidikan belum disosialisasikan pada saat pra legislasi, tiba tiba menjadi regulasi, kagetan setelah diterapkan karena juga belum disosialisasikan. Fakta dan realitas tentang itu sudah sering kita dapatkan sehingga produk kebijakan seringkali mendapatkan penolakan dari masyarakat atau stakeholder terkait. Untuk itu, para pemangku kepentingan sebaiknya memulai pada saat draf produk kebijakan pendidikan mau digulirkan, termasuk konten dan struktur yang ada dalam aturannya, perilaku yang diharapkan sudah mulai disosialisasikan agar mendapatkan masukan untuk disempurnakan menjadi sebuah kebijakan yang bisa diterima semua pihak.(Arwildayanto, 2018b)

Berdasarkan uraian di atas maka sesuai dengan pelaksanaan kebijakan pola interaksi, mengadopsi pola interaksi, badan pelaksana kebijakan yang

bertanggung jawab dalam implementasi dan *environmental factors*. Langkah-langkah pelaksanaan kebijakan pimpinan pesantren Muhammadiyah Sapirok Tapanuli Selatan dengan menyusun rencana bulanan dan tahunan, melakukan musyawarah pimpinan serta bersama-sama guru/ustadz, orangtua, stakeholders, melakukan perumusan kebijakan, sosialisasi kebijakan, dan pelaksanaannya di pesantren Muhammadiyah Sapirok Tapanuli Selatan.

E. KESIMPULAN

Ada dua kesimpulan dari kajian yang dilakukan. Pertama, perumusan kebijakan pimpinan pesantren dalam pengembangan budaya belajar santri di pesantren Muhammadiyah Sapirok Tapanuli Selatan, dilakukan dengan cara musyawarah yang dihadiri oleh Direktur, kepala bagian, Kepala Madrasah Aliyah, Kepala MTsS, Pimpinan Kesyarikatan, Guru-guru, perwakilan santri-santriyah melalui IPM, orangtua, serta *stake holder* pondok pesantren Muhammadiyah KH. Ahmad Dahlan. Merumuskan peningkatan pengembangan dan pengawasan budaya belajar di pesantren baik ketika diruangan kelas maupun diluar ruangan kelas. Kedua, Pelaksanaan kebijakan pimpinan pesantren, pimpinan melakukan sosialisasi, pelaksanaan dengan prinsip keikhlasan, dan kesabaran, dengan memegang prinsip Islam, memegang prinsip-prinsip pendidikan yang berlaku di Indonesia serta evaluasi pelaksanaan secara rutin. Pelaksanaan pembelajaran di ruangan kelas, di masjid, ekstrakurikuler dan tempat lainnya dengan memperhatikan aturan yang berlaku di Pesantren Muhammadiyah KH. Ahmad Dahlan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, S. (2014). *Kebijakan Publik*. Pustaka Setia.
- Arwildayanto. (2018a). *Analisis kebijakan Pendidikan: kajian teoretis, Eksploratif, dan Aplikatif*. Cendekia Press.
- Arwildayanto. (2018b). *Analisis kebijakan Pendidikan: Kajian Teoretis, Eksploratif, dan Aplikatif*. Cendekia Press.
- Djam'an Satori, A. K. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Galih R, N. P. (2016). *Politik Pendidikan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Kadji, Y. (2015). *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik: Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas*. UNG Press Gorontalo.
- M. Junaidi Ghony, F. A. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif*. Ar-Ruzz Media.
- Madjid, A. (2018). *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Samudra Biru.
- Mesiono. (2019). Kebijakan Majelis Pendidikan Al-wasliyah dalam Pengembangan Kurikulum Pendidikan Islam. *Jurnal The 12TH International Workshop and Asean Studies In Islamic and Arabic Education, Linguistics, Social Sciences and Educational Technology*.
- Moleong. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Muhaimin. (2010). *Manajemen Pendidikan: Aplikasinya dalam Penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah/Madrasah*. Kencana.
- Purba, F. (2017). *Kepemimpinan Di Lembaga Pendidikan Islam*. Manhaji.
- Qomar, M. (2007). *Manajemen Pendidikan Islam*. Erlangga.
- Rohman, A. (2009a). *Politik Ideologi Pendidikan*. LaksBang Mediatama.
- Rohman, A. (2009b). *Politik Ideologi Pendidikan*. LaksBang Mediatama.
- Rusdiana, H. A. (2015). *Kebijakan Pendidikan "dari Filosofi ke Implementasi."* Pustaka Setia.
- Samsul Nizar, M. S. (2010). *Isu-Isu Kontemporer tentang Pendidikan Islam*. Kalam Mulia.
- Sanjaya, W. (2013). *Penelitian Pendidikan: Jenis, Metode dan Prosedur*. Kencana Prenada Media Group.
- Sisdiknas, Pub. L. No. 20 (2003).
- Sulaiman. (2018). Pola Kepemimpinan Kiai Dalam Mengembangkan Pendidikan Di Pondok Pesantren. *Edukasi, 11(2)*.
- Syafaruddin. (2008). *Efektivitas kebijakan pendidikan*. Rineka Cipta.
- Syafaruddin. (2012). *Pendidikan Dan Pemberdayaan Masyarakat: Esay-Esai Pemikiran Pemberdayaan Dari Aspek Manajerial, Kecerdasan Dan Kepribadian*. Perdana Publishing.
- Syafaruddin. (2014). *Ilmu Pendidikan Islam: Melejitkan Potensi Budaya Umat*. Hijri Pustaka Utama.
- Wardi, S., & Arif, Z. (2023). A Critical Review on The Law of Cina Buta (Chinese Blind) According to Shaykh Abdul Qadir Bin Abdul Muthalib Al Mandili Al Indonesia Al Shafi'i. *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum, 21(1)*, 15–23. <https://doi.org/https://doi.org/10.35905/diktum.v21i1.4954>
- Wijaya, C. (2017). *Perilaku Organisasi*. Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia (LPPPI).
- Wijayanti, I. (2019). Gaya Kepemimpinan Dalam Pengambilan Kebijakan di Perguruan Islam Pondok Tremas Pacitan. *Muslimheritage*.